

Sistem Kebijakan Pengelolaan Pendidikan Dasar

Ayu Kartika¹, Suryanti Eka Putri², Rahmat Firmansyah³, Hafiz Hidayat⁴

^{1,2,3,4}Program Magister, Pendidikan Dasar, Universitas Adzkia

E-mail: aifaadib2017@gmail.com¹, putrisuryanti50@gmail.com², rahmat.f37.rf@gmail.com³,
hafizhidayat@adzkia.ac.id⁴

Abstract. Basic education plays a central role in character building and preparing individuals for the future. To achieve optimal goals, the policy and management system of education (Pendas) must be analysed in depth. This study uses a qualitative method with a library study approach to evaluate the pros and cons of the Pendas policy system and Pendas management system. Content analysis of relevant literature revealed that the Pendas policy system provides clarity of national vision and educational inclusion, although it is prone to bureaucracy and slow in adaptation. On the other hand, the Pendas management system offers local adaptability and active participation, but may face inter-agency coordination challenges. This study provides in-depth insights into critical components such as curriculum policy, human resource management and education evaluation and highlights the need for integrative strategies to strengthen an inclusive and competitive education system.

Keywords: Policy System, Management, Primary Education.

Abstrak. Pendidikan dasar memainkan peran sentral dalam pembentukan karakter dan persiapan individu untuk menghadapi masa depan. Untuk mencapai tujuan optimal, sistem kebijakan dan pengelolaan pendidikan (Pendas) harus dianalisis secara mendalam. Studi ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi perpustakaan untuk mengevaluasi pro dan kontra dari sistem kebijakan Pendas dan sistem pengelolaan Pendas. Analisis konten dari literatur yang relevan mengungkapkan bahwa sistem kebijakan Pendas memberikan kejelasan visi nasional dan inklusi pendidikan, meskipun rentan terhadap birokrasi dan lambat dalam adaptasi. Di sisi lain, sistem pengelolaan Pendas menawarkan adaptabilitas lokal dan partisipasi aktif, namun mungkin menghadapi tantangan koordinasi antar lembaga. Studi ini memberikan wawasan mendalam tentang komponen kritis seperti kebijakan kurikulum, manajemen sumber daya manusia, dan evaluasi pendidikan, serta menyoroti perlunya strategi integratif untuk memperkuat sistem pendidikan yang inklusif dan berdaya saing.

Kata kunci: Sistem Kebijakan, Pengelolaan, Pendidikan Dasar.

LATAR BELAKANG

Pendidikan memegang peran kunci dalam membentuk karakter, membuka peluang, dan mempersiapkan individu untuk menghadapi tantangan di masa depan. Untuk mencapai tujuan pendidikan yang optimal, diperlukan tidak hanya upaya dalam penyampaian materi pelajaran, tetapi juga sistem kebijakan dan pengelolaan pendidikan (Pendas) yang kokoh dan terarah. Sistem kebijakan Pendas memberikan kerangka kerja yang mengatur landasan hukum, standar kualitas, dan arahan strategis untuk perkembangan pendidikan di suatu negara atau wilayah. Di sisi lain, sistem pengelolaan Pendas mengelola aspek operasional pendidikan di tingkat lokal, termasuk pengaturan kurikulum, penempatan tenaga pendidik, manajemen keuangan, dan pemeliharaan fasilitas pendidikan.

Dalam pemahaman mendalam tentang sistem kebijakan dan pengelolaan Pendas, kita dapat mengevaluasi pro dan kontra dari masing-masing sistem tersebut. Dari satu sisi, sistem kebijakan Pendas memberikan kejelasan dan konsistensi dalam visi pendidikan nasional,

mendorong inklusi pendidikan, dan mengatasi disparitas akses. Namun, sistem ini rentan terhadap birokrasi yang berlebihan dan sering kali lambat dalam menyesuaikan diri dengan perubahan dinamis di masyarakat dan teknologi.

Di sisi lain, sistem pengelolaan Pendas memberikan fleksibilitas dan adaptabilitas dalam merespons kebutuhan lokal, memungkinkan penyesuaian yang lebih cepat terhadap perubahan lingkungan. Hal ini juga mendorong partisipasi aktif dari para pemangku kepentingan lokal, memperkuat rasa kepemilikan terhadap proses pendidikan. Namun, kelemahannya terletak pada kurangnya koordinasi antar lembaga pendidikan, yang dapat mengakibatkan ketidaksetaraan dalam kualitas pendidikan antar wilayah atau lembaga.

Dengan demikian, pemahaman yang matang tentang sistem kebijakan dan pengelolaan Pendas sangat penting dalam upaya meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan secara keseluruhan. Melalui evaluasi yang cermat terhadap pro dan kontra dari kedua sistem ini, pemerintah dan pemangku kepentingan pendidikan dapat merancang strategi yang lebih efektif untuk memajukan sistem pendidikan yang berdaya saing dan inklusif bagi semua lapisan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi perpustakaan (Suhiono, 2010). Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan data dari berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian tentang sistem kebijakan dan pengelolaan pendidikan dasar (Pendas). Populasi dalam penelitian ini meliputi seluruh literatur yang berkaitan dengan sistem kebijakan dan pengelolaan pendidikan dasar, termasuk buku, artikel jurnal, laporan penelitian, serta dokumen resmi pemerintah. Sampel penelitian dipilih secara purposive sampling, memfokuskan pada literatur yang dianggap paling relevan dan berkontribusi signifikan dalam memahami topik yang diteliti.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, dengan mencari, mengumpulkan, dan menelaah berbagai literatur yang sesuai dengan topik penelitian. Data dianalisis menggunakan teknik analisis konten, yang melibatkan reduksi data ke dalam kategori-kategori seperti kebijakan kurikulum, pengelolaan sekolah, sumber daya manusia, keuangan, evaluasi, dan pemantauan. Hasil analisis disajikan dalam bentuk narasi sistematis untuk memudahkan pemahaman, dengan penarikan kesimpulan berdasarkan temuan utama dari literatur yang ditelaah (Sugiyono, 2010).

Penelitian menggunakan model analisis deskriptif-kualitatif untuk mendeskripsikan sistem kebijakan dan pengelolaan Pendas serta mengevaluasi berbagai perspektif dari literatur yang dikumpulkan. Validitas dan reliabilitas penelitian dijaga melalui triangulasi sumber, peer review, dan audit trail, untuk memastikan konsistensi, akurasi, dan transparansi seluruh proses penelitian.

Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan memberikan kontribusi yang signifikan dalam pemahaman dan evaluasi sistem kebijakan dan pengelolaan pendidikan dasar, serta memberikan rekomendasi yang relevan untuk pengembangan kebijakan pendidikan di masa depan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Sistem Kebijakan Pendas

Sistem Kebijakan Pendidikan Dasar (Pendas) adalah kerangka kerja yang mengatur kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan dasar di suatu negara atau wilayah tertentu. Sistem ini mencakup serangkaian kebijakan yang dirancang untuk memandu berbagai aspek penting dalam pendidikan dasar, termasuk kurikulum, pengelolaan sekolah, sumber daya manusia, keuangan, serta evaluasi dan pemantauan.

Kebijakan merupakan aktivitas politik yang dilaksanakan dengan sengaja berdasarkan pemikiran yang bijaksana dan terarah yang dilakukan oleh organisasi, lembaga maupun instansi pemerintah dalam memecahkan permasalahan untuk mendapatkan keputusan yang sesuai dengan tujuan (Risnawan, 2017). Setiap aspek kehidupan terdapat kebijakan masing-masing yang dijadikan pedoman dan panduan dalam melakukan aktivitas dan membatasi perilaku sehingga lebih jelas dan terarah.

Kebijakan ini pun berlaku pada sistem pendidikan yang disebut dengan kebijakan pendidikan. Kebijakan pendidikan ada dikarenakan munculnya permasalahan-permasalahan yang terjadi di bidang pendidikan (Sutapa, 2008). Permasalahan ini terjadi dikarenakan terdapatnya kesenjangan antara penyelenggara pendidikan dengan tujuan pendidikan (Suyahman, 2016). Kebijakan pendidikan merupakan sebuah aktivitas dalam merumuskan langkah maupun tahapan dalam penyelenggaraan pendidikan melalui penjabaran visi misi pendidikan yang bertujuan untuk mencapai tujuan pendidikan pada waktu tertentu (Fatkuroji, 2017).

Selain itu ada juga yang berpendapat bahwa kebijakan pendidikan berhubungan dengan efektivitas dan efisiensi anggaran Pendidikan (Riant, 2008). Kebijakan pendidikan merupakan kebijakan publik yang mengelola khusus bidang pendidikan serta berhubungan dengan alokasi,

penyerapan dan distribusi sumber pelaksanaan pendidikan maupun pengelolaan perilaku pendidikan (Bakry, 2010).

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kebijakan pendidikan merupakan kebijakan yang berhubungan dengan bidang pendidikan dalam proses penjabaran visi misi pendidikan agar tercapainya tujuan pendidikan melalui langkah strategis pelaksanaan Pendidikan.

Komponen Sistem Kebijakan Pendas

Berikut adalah beberapa komponen utama dari Sistem Kebijakan Pendidikan Dasar:

- a. Kebijakan Kurikulum: Kebijakan kurikulum menetapkan standar dan tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh siswa di tingkat pendidikan dasar. Ini mencakup penentuan struktur kurikulum, materi pelajaran yang harus diajarkan, metode pengajaran yang disarankan, serta penilaian hasil belajar. Kebijakan ini biasanya disusun dengan memperhatikan kebutuhan pendidikan nasional, perkembangan masyarakat, dan standar internasional.
- b. Kebijakan Pengelolaan Sekolah: Kebijakan ini mengatur berbagai aspek pengelolaan sekolah, termasuk tata kelola sekolah, kepemimpinan kepala sekolah, manajemen sumber daya sekolah, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sekolah. Tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan belajar yang efektif, aman, dan inklusif di setiap sekolah.
- c. Kebijakan Sumber Daya Manusia: Kebijakan ini berkaitan dengan pengelolaan sumber daya manusia di bidang pendidikan dasar, termasuk kebijakan rekrutmen, pelatihan, pengembangan profesional, dan evaluasi kinerja guru dan staf pendidik lainnya. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap tenaga pendidik memiliki kualifikasi yang memadai dan mendukung keberhasilan pembelajaran siswa.
- d. Kebijakan Keuangan Pendidikan: Kebijakan keuangan pendidikan mencakup alokasi anggaran, pengelolaan dana pendidikan, sistem pembiayaan pendidikan dasar, serta kebijakan biaya pendidikan dan bantuan finansial bagi siswa. Tujuannya adalah untuk memastikan ketersediaan dana yang cukup dan penggunaan yang efisien untuk mendukung pendidikan dasar yang berkualitas dan inklusif.
- e. Kebijakan Evaluasi dan Pemantauan: Kebijakan ini menetapkan kerangka kerja untuk evaluasi dan pemantauan kinerja sistem pendidikan dasar secara keseluruhan, termasuk evaluasi hasil belajar siswa, kinerja sekolah, dan efektivitas kebijakan pendidikan. Ini bertujuan untuk mengidentifikasi keberhasilan, tantangan, dan area perbaikan dalam penyelenggaraan pendidikan dasar.

Komponen Kebijakan Pendidikan Charles O. Jones (1979) menyatakan ada 5 komponen kebijakan pendidikan yaitu;

a. Goal (Tujuan)

Tujuan diartikan sebagai hasil yang ingin didapatkan oleh individu maupun kelompok dalam rentang waktu yang ditetapkan. Tujuan dirancang sebagai langkah awal dalam merencanakan suatu kegiatan. Sebuah kebijakan pendidikan harus memiliki tujuan yang jelas agar proses penerapannya terarah. Tujuan kebijakan pendidikan harus dibuat rasional agar mudah diterima oleh berbagai pihak

b. Plan (Rencana)

Setelah tujuan pendidikan dirancang maka selanjutnya adalah membuat perencanaan kerja yang lebih spesifik agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Rencana kerja dibuat bertujuan untuk proses manajemen dan penerapan kebijakan pendidikan agar proses pengimplementasiannya terarah dan jelas.

c. Programme (Program)

Setelah perencanaan kerja dibuat maka selanjutnya adalah proses pengembangan program. Program merupakan aktivitas berupa proyek yang nyata berdasarkan tujuan yang telah didesain sebelumnya. Program merupakan upaya yang dilakukan agar tercapainya tujuan dengan cara melihat tingkat keberhasilannya. Pembuatan kebijakan pendidikan diharapkan untuk dapat mengembangkan beberapa alternatif yang dapat dijadikan pertimbangan ketika proses pengambilan keputusan

d. Decision (Keputusan).

Keputusan merupakan sebagai bentuk tindakan dalam penentuan tujuan, pembuatan rencana program, pelaksanaan program, dan proses evaluasi program. Pengambilan keputusan dilakukan dengan mempertimbangkan hasil uji coba terhadap alternatif-alternatif kebijakan pendidikan. Hasil keputusan kebijakan pendidikan harus bersifat rasionalitas agar hasil tersebut dapat diterima oleh berbagai pihak;

e. Effects (Dampak).

Dampak merupakan pengaruh yang ditimbulkan setelah kebijakan di laksanakan. Dampak ini dapat berupa sengaja maupun ketidaksengajaan baik berupa dampak primer maupun dampak sekunder. Dampak juga dapat berupa dampak positif maupun dampak negatif.

Komponen-komponen ini lah yang dapat melahirkan sebuah kebijakan pendidikan. Tanpa adanya salah satu dari komponen tersebut maka tidak akan berjalannya kebijakan pendidikan. Kelima komponen ini saling berhubungan dan mendukung satu

dengan yang lainnya.

Karakteristik Kebijakan Pendidikan

Kebijakan pendidikan memiliki karakteristik yang membedakannya dengan kebijakan lainnya. Adapun karakteristik kebijakan pendidikan yaitu:

- a. Memiliki tujuan pendidikan Sebuah kebijakan pendidikan harus memiliki tujuan khusus yang berhubungan dengan dunia pendidikan. Tujuan pendidikan yang disusun harus lebih terarah dan jelas serta memberikan gambaran mengenai kontribusi terhadap dunia pendidikan, (Lazwardi, 2017).
- b. Terpenuhinya aspek legal dan formal Sebelum kebijakan pendidikan dilakukan maka perlu dipenuhi prasyarat-prasyarat yang agar kebijakan tersebut berlaku sah dan diakui. Oleh sebab itu perlunya kebijakan tersebut di sah kan melalui persyaratan konstitusional berdasarkan hirarki konstitusi yang berlaku sehingga dilahirkan legimasi kebijakan pendidikan, (Anwar, 2017).
- c. Memiliki konsep operasional Kebijakan pendidikan merupakan seperangkat panduan yang bersifat umum. Maka sebuah kebijakan pendidikan harus memiliki manfaat operasional yang dapat diterapkan, (Solichin, 2015). Konsep operasional ini harus dimiliki agar pencapaian tujuan dapat di ukur secara jelas.
- d. Dibuat oleh yang berwenang Kebijakan pendidikan dirumuskan dan dibuat oleh par ahli yang memiliki hak dan wewenang dalam pembuatan kebijakan, (Heriawan, 2018). Hal ini bertujuan agar tidak timbulnya permasalahan baru yang dihasilkan dari kebijakan tersebut. Dapat dievaluasi Kebijakan pendidikan harus dapat dievaluasi. Suatu kebijakan apabila baik maka kebijakan tersebut dapat dikembangkan, (Lukitasari et al, 2017). Apabila kebijakan tersebut terdapat kesalahan maka harus dapat diperbaiki.
- e. Memiliki sistematika Kebijakan pendidikan terdapat sistematika yang berhubungan dengan seluruh aspek yang terdapat didalamnya. Sistematika harus memperhatikan efisiensi, efektivitas dan keberlanjutan. Kebijakan juga harus bersifat tidak pragmatis dan deskriptif. Kebijakan juga tidak boleh bersifat rapuh struktur, (Rahman, 2014). Hal ini agar kebijakan yang dilahirkan tidak mengalami kecacatan hukum baik secara internal maupun eksternal.

Implementasi Kebijakan Pendidikan

Dalam proses pembuatan kebijakan ada satu tahapan penting yang harus dilaksanakan yaitu implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan merupakan sebuah proses dalam menerapkan kebijakan yang telah disepakati dari berbagai alternatif kebijakan yang telah di desain, (Akib, 2012). Jika dikaitkan dengan kebijakan pendidikan maka implementasi

kebijakan pendidikan merupakan penerapan kebijakan pendidikan yang telah diputuskan bersama dari berbagai alternatif kebijakan pendidikan lainnya, (Sulistiyadi, 2014). Implementasi kebijakan pendidikan merupakan keseluruhan kegiatan yang dilaksanakan oleh individu maupun sekelompok pemangku kepentingan untuk menerapkan kebijakan dalam mencapai tujuan pendidikan, (Prasojo, 2010). Maka dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pendidikan merupakan aktivitas dalam menerapkan kebijakan yang telah disepakati yang berguna untuk mencapai tujuan pendidikan.

Dalam proses implementasi kebijakan akan terlihat kendala atau permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian tujuan pendidikan. Dari semua rangkaian perumusan kebijakan pendidikan, maka proses implementasi ini lah yang menjadi tahapan yang lebih rumit dan kompleks. Hal ini dikarenakan perlunya kerjasama yang kuat antar elemen yang ada baik dari pihak pusat maupun elemen daerah.

Proses implementasi kebijakan pendidikan terdiri umumnya menggunakan empat pendekatan yaitu:

- a. Pendekatan struktural. Pada hakikatnya pendekatan struktural bersifat top down. Pendekatan ini memandang bahwa perancangan, pengimplementasian dan proses evaluasi kebijakan pendidikan dilakukan secara struktural serta sesuai dengan tingkatan maupun tahapannya, (Yuliah, 2020). Sehingga jika diamati bahwa pendekatan ini lebih bersifat birokratis dan cenderung kaku
- b. Pendekatan prosedural dan manajerial. Pendekatan prosedural dan manajerial lebih mementingkan prosedur dan teknik yang tepat dalam mengembangkan kebijakan dibandingkan penataan struktur pelaksana, (Setyawan, 2014). Sehingga pendekatan ini membutuhkan alat teknologi dalam proses pengimplementasian kebijakan
- c. Pendekatan perilaku. Pendekatan perilaku memandang bahwa pelaksana kebijakan adalah perilaku manusia, (Machali, 2015). Implementasi kebijakan pendidikan akan terlaksana dengan baik apabila manusia juga memiliki perilaku yang baik;
- d. Pendekatan politik. Pendekatan politik lebih memfokuskan faktor politik penguasa dalam mempermudah maupun menghambat penerapan kebijakan pendidikan, (Hartono, 2016).

Pendekatan ini cenderung mempertimbangkan kenyataan politik yang terjadi. Keempat pendekatan ini memiliki kelebihan dan kekurangan namun sehingga memerlukan kebijaksanaan dalam menggunakannya agar kebijakan pendidikan dapat mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan.

Sistem Pengelolaan Pendas

Sistem Pengelolaan Pendidikan Dasar (Pendas) merupakan kerangka kerja yang sangat penting dalam mengatur berbagai aspek operasional pendidikan dasar, yang mencakup sekolah-sekolah tingkat dasar dan menengah pertama. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan penyelenggaraan pendidikan yang efektif, inklusif, dan berkualitas bagi semua peserta didik di tingkat ini.

Dalam konteks pendidikan dasar, Sistem Pengelolaan Pendidikan mencakup sejumlah komponen yang penting untuk diperhatikan:

1. **Manajemen Kurikulum:** Pengelolaan kurikulum mencakup perancangan, pengembangan, dan implementasi kurikulum pendidikan dasar. Hal ini mencakup pemilihan bahan ajar yang relevan dengan kebutuhan peserta didik, pengaturan jadwal pembelajaran yang efektif, serta pengembangan metode pengajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa. Selain itu, manajemen kurikulum juga mencakup penilaian hasil belajar siswa secara berkala untuk memastikan pemahaman dan pencapaian yang optimal (Rahmawati, D., & Anggraini, A. D. (2017).
2. **Manajemen Tenaga Pendidik:** Aspek ini melibatkan manajemen sumber daya manusia di bidang pendidikan dasar, termasuk guru dan staf pendidik lainnya. Ini mencakup rekrutmen, seleksi, pelatihan, pengembangan profesional, dan evaluasi kinerja guru. Manajemen yang efektif dari tenagapendidik sangat penting untuk memastikan kualitas pengajaran yang tinggikan dukungan yang memadai bagi proses pembelajaran.
3. **Manajemen Sumber Daya Keuangan:** Pengelolaan sumber daya keuangan pendidikan dasar mencakup perencanaan, pengalokasian, dan pengawasan anggaran. Ini melibatkan alokasi dana yang tepat untuk mendukung kegiatan pembelajaran, pengadaan bahan ajar, perawatan fasilitas, serta pengembangan infrastruktur pendidikan. Pengelolaan keuangan yang efisien dan transparan sangat penting untuk memastikan sumber daya yang memadai dan optimal dalam mendukung proses pendidikan dasar.
4. **Manajemen Fasilitas dan Infrastruktur:** Aspek ini mencakup pengelolaan fasilitas fisik seperti gedung sekolah, ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, serta infrastruktur pendukung lainnya seperti teknologi informasi dan komunikasi. Tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan kondusif bagi proses pembelajaran. Pengelolaan fasilitas dan infrastruktur yang baik sangat penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan dasar dan memastikan bahwa semua siswa memiliki akses yang setara.

Pengelolaan fasilitas merupakan kegiatan yang mengatur penyiapan segala perlengkapan yang dibutuhkan untuk melaksanakan proses pendidikan di suatu sekolah. Pengelolaan fasilitas diperlukan untuk membantu proses belajar mengajar berjalan dengan lancar. Pada dasarnya tujuan diadakannya perencanaan sarana dan prasarana yaitu

- 1) untuk menghindari terjadinya kesalahan dan kegagalan yang tidak diinginkan; dan
- 2) untuk meningkatkan efektifitas dan efesiensi dalam pelaksanaannya. Salah rencana dan penentuan kebutuhan merupakan kekeliruan dalam menetapkan kebutuhan sarana dan prasarana yang kurang/ tidak memandang kebutuhan kedepan, dan kurang cermat dalam menganalisis kebutuhan sesuai dengan dana yang tersedia dan tingkat kepentingan.(Kristiawan, Safitri, & Lestari, 2017)

5. **Monitoring dan Evaluasi:** Bagian penting dari Sistem Pengelolaan Pendidikan Dasar adalah pemantauan dan evaluasi terhadap proses pembelajaran, kinerja siswa, serta efektivitas strategi pengajaran dan manajemen. Evaluasi ini membantu mengidentifikasi keberhasilan, tantangan, dan area perbaikan dalam penyelenggaraan pendidikan dasar. Dengan memantau dan mengevaluasi secara teratur, lembaga pendidikan dapat mengidentifikasi strategi yang efektif dan memperbaiki kelemahan dalam proses pembelajaran.

Melalui integrasi yang baik antara semua komponen ini, Sistem Pengelolaan Pendidikan Dasar bertujuan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif, efektif, dan berkualitas untuk pertumbuhan dan perkembangan seluruh peserta didik. Dengan manajemen yang baik, lembaga pendidikan dasar dapat mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dan memberikan dampak positif bagi kemajuan pendidikan di tingkat dasar.

Pro dan Kontra Sistem Kebijakan dan Pengelolaan Pendas

Sistem Kebijakan dan Pengelolaan Pendidikan Dasar (Pendas) menawarkan berbagai keuntungan yang signifikan. Pertama, standarisasi dan konsistensi yang diberikan oleh sistem ini menyediakan kerangka kerja standar untuk pendidikan dasar, memastikan konsistensi dalam kurikulum, penilaian, dan praktik pengajaran di seluruh wilayah. Hal ini membantu menyeimbangkan perbedaan regional dan meningkatkan kesetaraan akses terhadap pendidikan. Kedua, keterpaduan dan koherensi dalam sistem yang terintegrasi memungkinkan berbagai aspek pendidikan, seperti kurikulum, pengelolaan sekolah, dan evaluasi, saling terkait dan mendukung satu sama lain. Ini menciptakan lingkungan belajar yang holistik dan terstruktur. Ketiga, transparansi dan akuntabilitas yang ditawarkan oleh sistem Pendas

memungkinkan transparansi dalam penggunaan sumber daya, alokasi anggaran, dan kebijakan-kebijakan pendidikan dasar. Ini meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pendidikan dan meningkatkan akuntabilitas lembaga pendidikan. Keempat, kebijakan yang tepat dalam sistem Pendas dapat meningkatkan aksesibilitas pendidikan dasar bagi semua anak, termasuk mereka yang berasal dari latar belakang ekonomi rendah atau daerah terpencil, sehingga membantu mengurangi kesenjangan pendidikan dan mempromosikan inklusivitas. Terakhir, adanya panduan dan dukungan yang jelas dari sistem kebijakan memungkinkan sekolah dan guru untuk bekerja menuju peningkatan kualitas pembelajaran dan pencapaian siswa, termasuk pengembangan metode pengajaran inovatif, pemantauan hasil belajar secara teratur, dan pengembangan kurikulum yang relevan.

Kontra Sistem Kebijakan dan Pengelolaan Pendidikan Dasar (Pendas)

Di sisi lain, Sistem Kebijakan dan Pengelolaan Pendidikan Dasar (Pendas) juga memiliki beberapa kelemahan. Pertama, terlalu banyak regulasi dan prosedur administratif dalam sistem ini dapat mengakibatkan birokrasi yang berlebihan, memperlambat respons dan inovasi dalam pembelajaran serta menghambat kemampuan sekolah dan guru untuk merespons dengan cepat terhadap kebutuhan siswa dan perubahan kontekstual. Kedua, kebijakan yang ditetapkan secara nasional atau regional mungkin tidak selalu sesuai dengan kebutuhan dan konteks unik di tingkat lokal, menyebabkan ketidakcocokan antara kebijakan yang diterapkan dan realitas sosial, budaya, atau ekonomi di daerah tertentu. Ketiga, keterbatasan finansial dalam sistem Pendas yang tidak didukung oleh alokasi anggaran yang memadai dapat menghambat upaya peningkatan kualitas pendidikan dasar dan menyebabkan ketidakmerataan dalam akses pendidikan, membatasi fasilitas, peralatan, dan pelatihan yang diperlukan. Keempat, beberapa kebijakan yang terlalu kaku atau terlalu banyak terstandarisasi dapat menghambat kreativitas dan fleksibilitas di tingkat sekolah dan kelas, mempersempit ruang lingkup inovasi dalam pendekatan pembelajaran dan menyulitkan guru untuk menyesuaikan metode pengajaran dengan kebutuhan individual siswa. Terakhir, dalam beberapa kasus, kepentingan politik, ekonomi, atau sosial tertentu mungkin mempengaruhi pembuatan kebijakan dan pengelolaan Pendas, yang dapat mengorbankan kepentingan pendidikan yang sebenarnya dan menyebabkan ketimpangan dalam distribusi sumber daya dan aksesibilitas pendidikan. Mempertimbangkan pro dan kontra tersebut membantu dalam menyusun kebijakan pendidikan yang lebih efektif dan inklusif, serta mengidentifikasi solusi yang tepat dalam mengatasi tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pendidikan dasar.

KESIMPULAN DAN SARAN

Sistem Kebijakan dan Pengelolaan Pendidikan Dasar (Pendas), serta dampaknya dalam konteks pendidikan dan masyarakat secara keseluruhan. Dalam teks tersebut, diuraikan kesimpulan, komponen, karakteristik, dan proses implementasi kebijakan pendidikan dengan jelas. Kebijakan pendidikan dipahami sebagai serangkaian langkah dan keputusan yang diambil untuk mencapai tujuan pendidikan melalui langkah-langkah strategis. Komponen-komponen utama dari Sistem Kebijakan Pendidikan Dasar, termasuk kebijakan kurikulum, pengelolaan sekolah, sumber daya manusia, keuangan pendidikan, evaluasi, dan pemantauan, dijelaskan secara rinci. Karakteristik kebijakan pendidikan, seperti memiliki tujuan yang jelas, memenuhi aspek legal dan formal, memiliki konsep operasional, dan dapat dievaluasi, ditekankan sebagai elemen penting. Selain itu, proses implementasi kebijakan pendidikan diuraikan sebagai tahap penting dalam menerapkan kebijakan untuk mencapai tujuan pendidikan, dengan melibatkan berbagai pendekatan seperti struktural, prosedural, perilaku, dan politik.

Sistem Pengelolaan Pendidikan Dasar juga dipahami sebagai kerangka kerja yang mengatur berbagai aspek operasional pendidikan dasar, dengan menyoroti manajemen kurikulum, tenaga pendidik, sumber daya keuangan, fasilitas, dan infrastruktur. Tinjauan pro dan kontra membantu memahami implikasi dari sistem kebijakan dan pengelolaan pendidikan dasar, dengan menyadari keuntungan seperti standarisasi, keterpaduan, dan transparansi, serta tantangan seperti birokrasi berlebihan, ketidaksesuaian dengan konteks lokal, keterbatasan finansial, kekakuan dalam implementasi, dan pertentangan kepentingan. Dengan demikian, melalui pemahaman yang mendalam tentang berbagai aspek ini, pengembangan kebijakan pendidikan yang efektif dan inklusif dapat direalisasikan, serta mengatasi tantangan dalam penyelenggaraan pendidikan dasar

DAFTAR REFERENSI

- Akib, H. (2012). Implementasi kebijakan: Apa, mengapa dan bagaimana. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 1(1), 1-11.
- Anwar, M. E. (2017). Menelusuri Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia. *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 3(05), 1-10.
- Azhari, U. L., & Kurniady, D. A. (2016). Manajemen pembiayaan pendidikan, fasilitas pembelajaran, dan mutu sekolah. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 23(2), 1-10.
- Bakry, A. (2010). Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik. *Jurnal Medtek*, 2(1), 1-13.

- Dewi, R. (2016). Kebijakan pendidikan di tinjau dari segi hukum kebijakan publik. *Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), 58-71.
- Fatkuroji, F. (2017). Implementasi Kebijakan Pembelajaran Terpadu dan Minat Pelanggan Pendidikan. *Tarbawi: Jurnal Keilmuan Manajemen Pendidikan*, 2(02), 28-40.
- Hakim, L. (2016). Pemerataan akses pendidikan bagi rakyat sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 2(1), 1-10.
- Hartono, Y. (2016). Pendidikan Dan Kebijakan Politik (Kajian Reformasi Pendidikan Di Indonesia Masa Orde Lama Hingga Reformasi). *Agastya: Jurnal Sejarah Dan Pembelajarannya*, 6(01), 35-45.
- Heriawan, I. (2018). Kebijakan Pendidikan Provinsi (SLTA dan SMK) dan Analisis SWOT di Kalimantan Timur. *Pendas Mahakam: Jurnal Pendidikan Dasar*, 3(2), 98-116.
- Jelita, M., Ramadhan, L., Pratama, A. R., Yusri, F., & Yarni, L. (2023). Teori Belajar Behavioristik. *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, 5(3), 404-411.
- Jones, C. O. (1979). American politics and the organization of energy decision making. *Annual Review of Energy*, 4(1), 99-119.
- Junaid, H. (2016). Sumber, Azas Dan Landasan Pendidikan (Kajian Fungsionalisasi secara makro dan mikro terhadap rumusan kebijakan pendidikan nasional). *Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman*, 7(2), 84-102.
- Kiwang, A. S., Pandie, D. B., & Gana, F. (2014). Kebijakan Publik dan Efektivitas Organisasi. *Jurnal Kebijakan Publik*, 5(3), 31-36.
- Kristiawan, M., Safitri, D., & Lestari, R. (2017). *Manajemen Pendidikan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Lazwardi, D. (2017). Manajemen kurikulum sebagai pengembangan tujuan pendidikan. *Al-Idarah: Jurnal Kependidikan Islam*, 7(1), 119-125.
- Lukitasari, S. W., Sulasmono, B. S., & Iriani, A. (2017). Evaluasi implementasi kebijakan pendidikan inklusi. *Kelola: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 4(2), 121-134.
- Machali, I. (2015). Pendekatan Integrasi-Interkoneksi dalam Kajian Manajemen dan Kebijakan Pendidikan Islam. *EL TARBAWI*, 8(1), 32-53.
- Nasarudin, T. M. (2016). Asas dan Norma Hukum Administrasi Negara Dalam Pembuatan Instrumen Pemerintahan. *Jurnal Hukum Novelty*, 7(2), 139-154.
- Perdana, N. S. (2021). Aksesibilitas Memperoleh Pendidikan Untuk Anak-Anak di Indonesia. *Jendela Kemendikbud*.
- Prasojo, L. D. (2010). Financial Resources Sebagai Faktor Penentu Dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan. *Jurnal Internasional Manajemen Pendidikan*, 4(02), 1-10.

- Pratama, A. R., Iswandi, I., Saputra, A., Hasan, R. H., & Arifmiboy, A. (2023). Pengaruh Model Pembelajaran Learning Cycle 5E terhadap Aktivitas Belajar Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMA Negeri 4 Kota Bukittinggi. *CENDEKIA: Jurnal Ilmu Sosial, Bahasa dan Pendidikan*, 3(1), 16-28.
- Rahman, H. (2014). Miskonsepsi Pendidikan Gratis. *Jurnal Al-Qalam: Jurnal Kajian Islam & Pendidikan*, 6(1), 36-45.
- Rahmawati, D., & Anggraini, A. D. (2017). Evaluasi Program Kurikulum Berdasarkan Standar Isi, Standar Proses, Dan Standar Kompetensi Lulusan Di SDN Pisangan Timur 10 Pagi. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Bisnis (JPEB)*, 5(1), 34. <https://doi.org/10.21009/jpeb.005.1.3>
- Riant, N. (2008). Kebijakan Pendidikan yang Unggul, Kasus Pembangunan Pendidikan di Kabupaten Jembrana, 2000—2006. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Risnawan, W. (2017). Peran dan Fungsi Infrastruktur Politik dalam Pembentukan Kebijakan Publik. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 4(3), 511-518.
- Setiyawan, E. (2014). Implementasi Kebijakan Bantuan Pendidikan (Studi tentang Kebijakan Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta yang termuat dalam Peraturan Walikota Surakarta Nomor 11A Tahun 2012). *Jurnal Administrasi Publik*, 2(1), 122-128.
- Solichin, M. (2015). Implementasi Kebijakan Pendidikan Dan Peran Birokrasi. *Religi: Jurnal Studi Islam*, 6(2), 148-178.
- Sugiyono, P. D. (2010). Metode Peneliiian. Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D.
- Sulistiyadi, H. K. (2014). Implementasi kebijakan penyelenggaraan layanan pendidikan inklusif di Kabupaten Sidoarjo. *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 2(1), 1-10.
- Sutapa, M. (2008). Kebijakan pendidikan dalam Perspektif Kebijakan Publik. *Jurnal Manajemen Pendidikan UNY*.
- Suyahman, S. (2016). Analisis Kebijakan Pendidikan Gratis Di Sekolah Menengah Atas Dalam Kaitannya Dengan Kualitas Pendidikan Menengah Atas. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 6(2), 1047-1054.
- Yuliah, E. (2020). Implementasi Kebijakan Pendidikan. *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum dan Pendidikan*, 30(2), 16-40.